

**ANALISIS HUBUNGAN IPM, KAPASITAS
FISKAL, DAN KORUPSI TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2008 DAN 2010)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

PURWIYANTI SEPTINA FRANCIARI

NIM. C2B 008 059

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Purwiyanti Septina Franciari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B 008 059

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS HUBUNGAN IPM, KORUPSI, DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2008 DAN 2010)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS

Semarang,

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS)

NIP. 195810081986031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Purwiyanti Septina Franciari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B 008 059

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS HUBUNGAN IPM, KORUPSI, DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2008 DAN 2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Desember 2012

Tim Penguji

1. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS (.....)

2. Dr. Nugroho SBM, MT. (.....)

3. Akhmad Syakir Kurnia, SE, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Purwiyanti Septina Franciari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUBUNGAN IPM, KORUPSI, DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2008 DAN 2010)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 November 2012

Yang membuat pernyataan,

(Purwiyanti Septina Franciari)

NIM: C2B 008 059

ABSTRACT

Poverty remains the biggest problem for Indonesia. Therefore, it is necessary to find solutions to overcome, or at least to reduce the level of poverty in Indonesia. This study aimed to analyze the effect of HDI, economic capacity, and corruption on poverty in Indonesia.

The method used in this study are OLS (Ordinary Least Square) and granger causality test using secondary data types. Research samples are 38 regencies/cities in Indonesia in 2008 and 2010.

The results of this study show that in 2008 HDI, fiscal capacity, and corruption have negative effect that not significant at $\alpha = 5$ percent and $\alpha = 10$ percent against poverty. In 2010, the fiscal capacity has negative effect that significant at $\alpha = 10$ percent against poverty, while HDI and corruption have negative effect that not significant. Based on the results of granger causality, there are differences in behavior patterns between 2008 and 2010.

Keywords: Poverty, HDI, Economic Capacity, Corruption

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari solusi untuk mengatasi, atau paling tidak untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dan uji kausalitas granger dengan menggunakan jenis data sekunder. Sampel penelitiannya yaitu 38 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 variabel IPM, kapasitas fiskal dan korupsi berpengaruh negatif secara tidak signifikan pada $\alpha = 5$ persen dan $\alpha = 10$ persen terhadap kemiskinan. Pada tahun 2010 variabel kapasitas fiskal berpengaruh negatif secara signifikan pada $\alpha = 10$ persen terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan korupsi berpengaruh negatif secara tidak signifikan. Berdasarkan hasil kausalitas granger, terdapat perbedaan pola perilaku antara tahun 2008 dan 2010.

Kata Kunci: Kemiskinan, IPM, Kapasitas fiskal, Korupsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Hubungan IPM, Korupsi, dan Kapasitas fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010)*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Drs. H. M. Nasir, M.Si, Akt, Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotivasi, meberikan masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek Woyanti, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

4. Mama tersayang, Partiwu Supriyati, dan Papa tercinta, Sugiyanto, atas curahan kasih kasih sayang, doa-doa, dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai bagiku.
5. Adik-adikku tercinta Kurniawan Dwi O., Widianingrum Putri D., dan Annisa Charisma W. atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan. Semoga kalian dapat menjadi lebih baik dari kakakmu ini.
6. Handhika Hendra Rhamadhan atas doa dan motivasi yang selalu diberikan. Terima kasih sudah mau menemani bolak-balik mencari data.
7. Ellen, Astri, Dita, Truly, Rani, Ifa, dan Erina untuk dukungan dan diskusi-diskusi kecilnya. You're my best friends.
8. Teman-teman IESP 2008 terima kasih untuk kerja sama dan bantuannya selama ini.
9. Teman-teman KKN Desa Senenan Jepara untuk semangat dan motivasinya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 12 November 2012

Penulis

Purwiyanti Septina Franciari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISP	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TELAAH PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Kemiskinan	19
2.1.1.1 Pengertian dan Batasan Kemiskinan	19
2.1.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan	25
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30
2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30
2.1.2.2 Hubungan Kemiskinan dengan IPM	34
2.1.3 Kapasitas fiskal dan Hubungan Kemiskinan dengan Kapasitas fiskal	36
2.1.3.1 Kapasitas fiskal	36
2.1.3.2 Hubungan Kapasitas fiskal dengan Kapasitas fiskal	39
2.1.4 Korupsi dan Hubungan Kemiskinan dengan	

	Korupsi	41
	2.1.4.1 Korupsi	41
	2.1.4.2 Hubungan Kemiskinan dengan Korupsi	51
	2.2 Penelitian Terdahulu	55
	2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	58
	2.4 Hipotesis	59
BAB III	METODE PENELITIAN	61
	3.1 Batasan Masalah	61
	3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	62
	3.3 Jenis dan Sumber Data	64
	3.4 Metode Analisis	65
	3.4.1 Matriks Korelasi	65
	3.4.2 Tujuan Pertama	66
	3.4.2.1 Pengujian Statistik	67
	3.4.2.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	69
	3.4.2 Tujuan Kedua	70
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	71
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian	71
	4.1.1 Kemiskinan	71
	4.1.2 IPM	73
	4.1.3 Kapasitas fiskal	76
	4.1.4 Korupsi	78
	4.1.5 Hubungan antara IPM, Kapasitas fiskal, Dan Korupsi terhadap Kemiskinan	81
	4.2 Hasil dan Analisis untuk Tujuan Pertama	82
	4.2.1 Pengujian Statistik	82
	4.2.2 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	86
	4.3 Hasil Analisis untuk Tujuan Kedua	88
	4.4 Pembahasan	90
	4.4.1 IPM (W)	90
	4.4.2 Kapasitas fiskal (E)	92
	4.4.3 Korupsi (K)	93
	4.4.4 Hasil Kausalitas Granger	95
BAB V	PENUTUP	97
	5.1 Ringkasan Temuan	97
	5.2 Kesimpulan	100
	5.3 Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kasus-kasus Korupsi di Daerah yang Sudah Disidik Tahun 2010 – 2011	13
Tabel 1.2 Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004 – 2011	14
Tabel 1.3 Rekap Tren Korupsi di Daerah Berdasarkan Pelakunya Tahun 2008 – 2011	15
Tabel 4.1 Kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2008 dan 2010	72
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia di 38 Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2008 dan 2010	75
Tabel 4.3 Kapasitas fiskal di 38 Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2008 dan 2010	77
Tabel 4.4 Indeks Persepsi Korupsi di 38 Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2008 dan 2010	79
Tabel 4.5 Matriks Korelasi antara Variabel IPM, Kapasitas fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Tahun 2008 dan 2010	81
Tabel 4.6 Hasil Regresi Pengaruh IPM, Kapasitas fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan	85
Tabel 4.7 Hasil Auxiliary Regression Model	86
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)	87
Tabel 4.9 Hasil Uji Jarque – Bera	87
Tabel 4.10 Hasil Uji Breusch-Godfrey	88
Tabel 4.11 Hasil Uji Kausalitas Granger	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Anggaran dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004 – 2010	1
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2011	3
Gambar 1.3 Trend IPM Indonesia Tahun 2004 – 2010	6
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi di Indonesia Tahun 2010	7
Gambar 1.5 Persebaran Kasus Korupsi di Indonesia Periode 2001 - 2011	11
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	26
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Kemiskinan, IPM, Kapasitas fiskal, dan Korupsi Korupsi di 38 Kabupaten Indonesia Tahun 2008 dan dan 2010	105
Lampiran B Hasil Regresi Utama	109
Lampiran C Uji Asumsi Klasik	112
Lampiran D Hasil Matriks Korelasi	124
Lampiran E Hasil Uji Kausalitas Granger	126

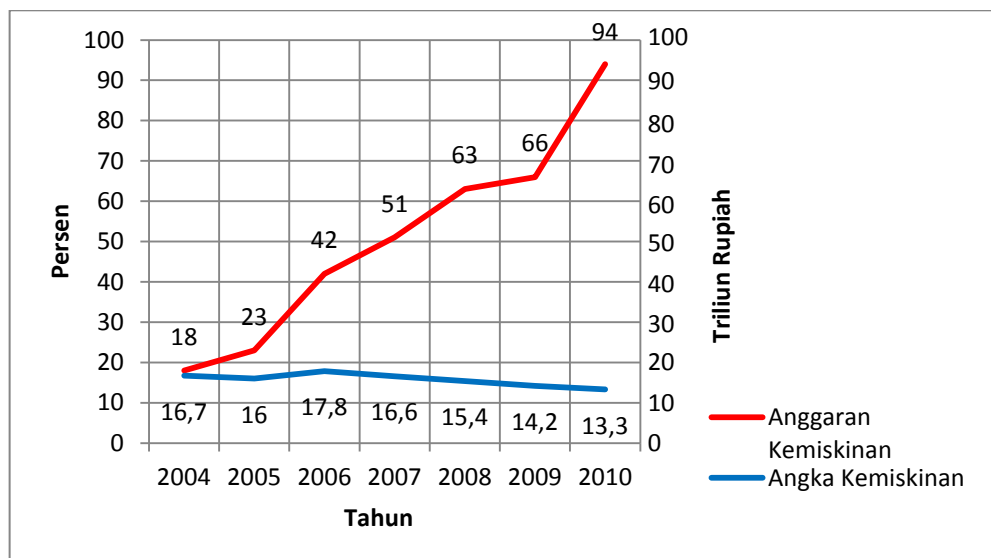
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah lebih dari 66 tahun sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, namun masih banyak permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Salah satu permasalahan terbesar bagi Bangsa Indonesia yaitu masih tingginya angka kemiskinan. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari APBN dan volume utang untuk pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah orang miskin sendiri masih sulit diturunkan.

**Gambar 1.1 Anggaran dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2004 – 2010**



Sumber: Menkokesra, Badan Pusat Statistik tahun 2004-2010

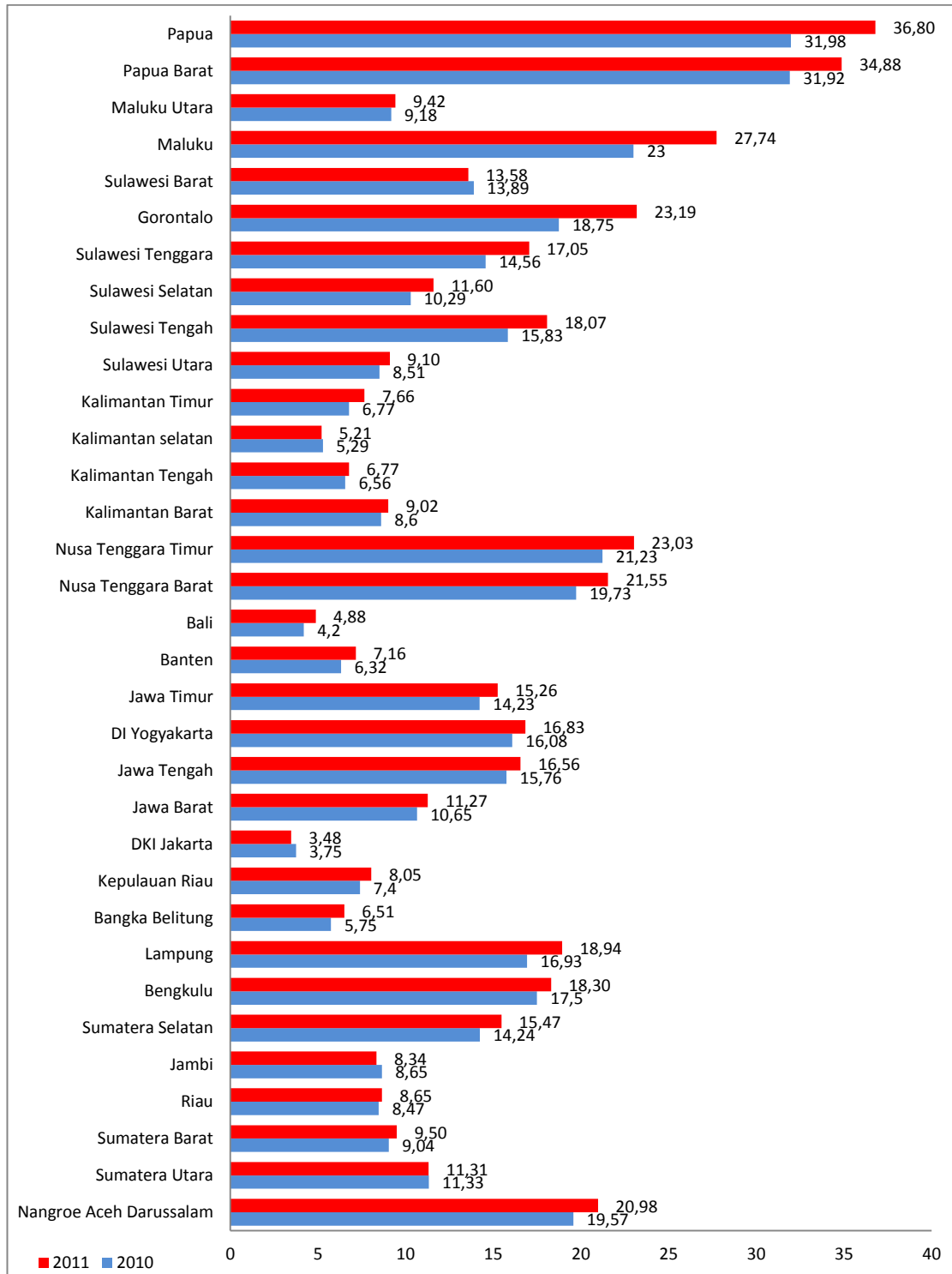
Grafik 1.1 menggambarkan bahwa anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2004 sebesar Rp 18 Triliun dengan angka kemiskinan sebesar 16,7%. Pada tahun 2005, anggaran kemiskinan naik

menjadi RP 23 Triliun, yang dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 16% saja. Anggaran untuk tahun 2006 naik hampir dua kali lipat anggaran tahun sebelumnya, menjadi Rp 42 Triliun, yang sayangnya pada tahun ini angka kemiskinan malah naik menjadi 17,8%. Hal ini dikarenakan naiknya harga BBM yang memicu naiknya harga berbagai macam barang, sehingga menyebabkan inflasi tahun 2006 mencapai 17,59%. Tingginya inflasi mengakibatkan penduduk tidak miskin yang pendapatannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi penduduk miskin. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, anggaran untuk pengentasan kemiskinan terus naik, sampai Rp 94 Triliun di tahun 2010 sedangkan angka kemiskinan turun sangat pelan, pada tahun 2010 hanya turun sampai 13,3%.

Sri Hartati Samhadi dalam tulisannya yang berjudul Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin menyebutkan bahwa sebelum krisis pada tahun 1997, APBN kurang dari Rp 100 triliun dan PDB sebesar Rp 877 triliun jumlah penduduk miskin sekitar 22 juta jiwa. Pada tahun 2011 ini, APBN mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi jumlah penduduk miskin malah meningkat sampai hampir 31 juta jiwa. APBN lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin atau membiayai birokrasi, yang pada kenyataannya tidak dapat menjalankan fungsinya. Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat. Sedangkan anggaran untuk subsidi dan belanja sosial turun. Hal ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*Korupsi yang Memiskinkan*, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2010-2011



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010 dan 2011, diolah

Grafik 1.2 menunjukkan persentase garis kemiskinan di Provinsi Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011 menurut BPS. Provinsi dengan persentase garis kemiskinan tertinggi di tahun 2010 adalah Provinsi Papua (31,98 persen), Provinsi Papua Barat (31,92 persen), Provinsi Gorontalo (23,00 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (21,23 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (19,73 persen). Sedangkan Provinsi dengan persentase garis kemiskinan terendah di tahun yang sama yaitu Provinsi DKI Jakarta (3,75 persen), Provinsi Bali (4,20 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (5,29 persen), dan Provinsi Bangka Belitung (5,57 persen).

Persentase garis kemiskinan pada tahun 2011 di 28 Provinsi mengalami kenaikan dibanding dengan persentase garis kemiskinan pada tahun 2010, dan sisanya sebanyak 5 Provinsi berhasil menurunkan persentase garis kemiskinannya. Provinsi dengan persentase garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Papua (36,80 persen), Provinsi Papua Barat (34,88 persen), Provinsi Maluku (27,74 persen), Provinsi Gorontalo (23,19 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (23,03 persen). Sedangkan Provinsi dengan persentase garis kemiskinan terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta (3,48 persen), Provinsi Bali (4,88 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (5,21 persen), Provinsi Bangka Belitung (6,51 persen), dan Provinsi Kalimantan Tengah (6,77 persen).

Angka kemiskinan ini hanya menghitung penduduk yang masuk kategori miskin absolut yang diukur dari pendapatan pada standar yang minim. Angka ini belum mencerminkan kemiskinan yang sebenarnya terjadi di Indonesia pada berbagai dimensi. Selain itu, BPS juga belum memasukkan penduduk yang

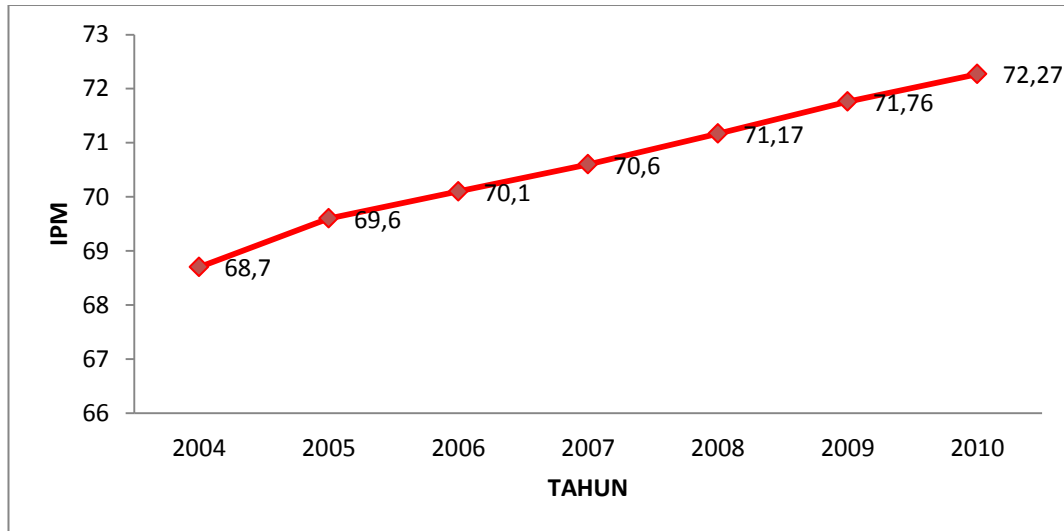
tergolong tidak miskin tetapi sangat rentan kemiskinan, yang mana jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk yang miskin absolut. Apabila menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan standar internasional, yaitu pendapatan US\$ 2 per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan semakin membengkak mencapai 42 persen.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menurut Sri Hartati Samhadi, dapat terlihat antara lain dari semakin luasnya daerah miskin dalam peta kemiskinan, banyaknya daerah tertinggal, memburuknya angka kematian ibu dan bayi, tingginya kekurangan gizi dan busung lapar, tingginya jumlah anak putus sekolah, banyaknya jumlah penduduk yang dianggap pantas menerima beras miskin dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), tingginya proporsi pekerja informal, tingginya proporsi penduduk tanpa akses ke hak-hak dasar, dominannya angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, tingginya angka bunuh diri dan kriminalitas dengan alasan kesulitan ekonomi, dan meluasnya permukiman kumuh perkotaan (*Korupsi yang Memiskinkan*, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).

Kemiskinan yang dialami seseorang terlihat dari kurang terpenuhinya kesejahteraan orang tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). IPM mengukur derajat pembangunan manusia yang merupakan salah satu aspek penting dari kualitas pembangunan ekonomi. IPM mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). IPM mengukur tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan yang diukur dari usia

harapan hidup, pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran sekolah dasar, lanjutan dan tinggi, serta standar hidup layak yang diukur dari paritas daya beli dan penghasilan.

Gambar 1.3 Trend IPM Indonesia Tahun 2004 - 2010

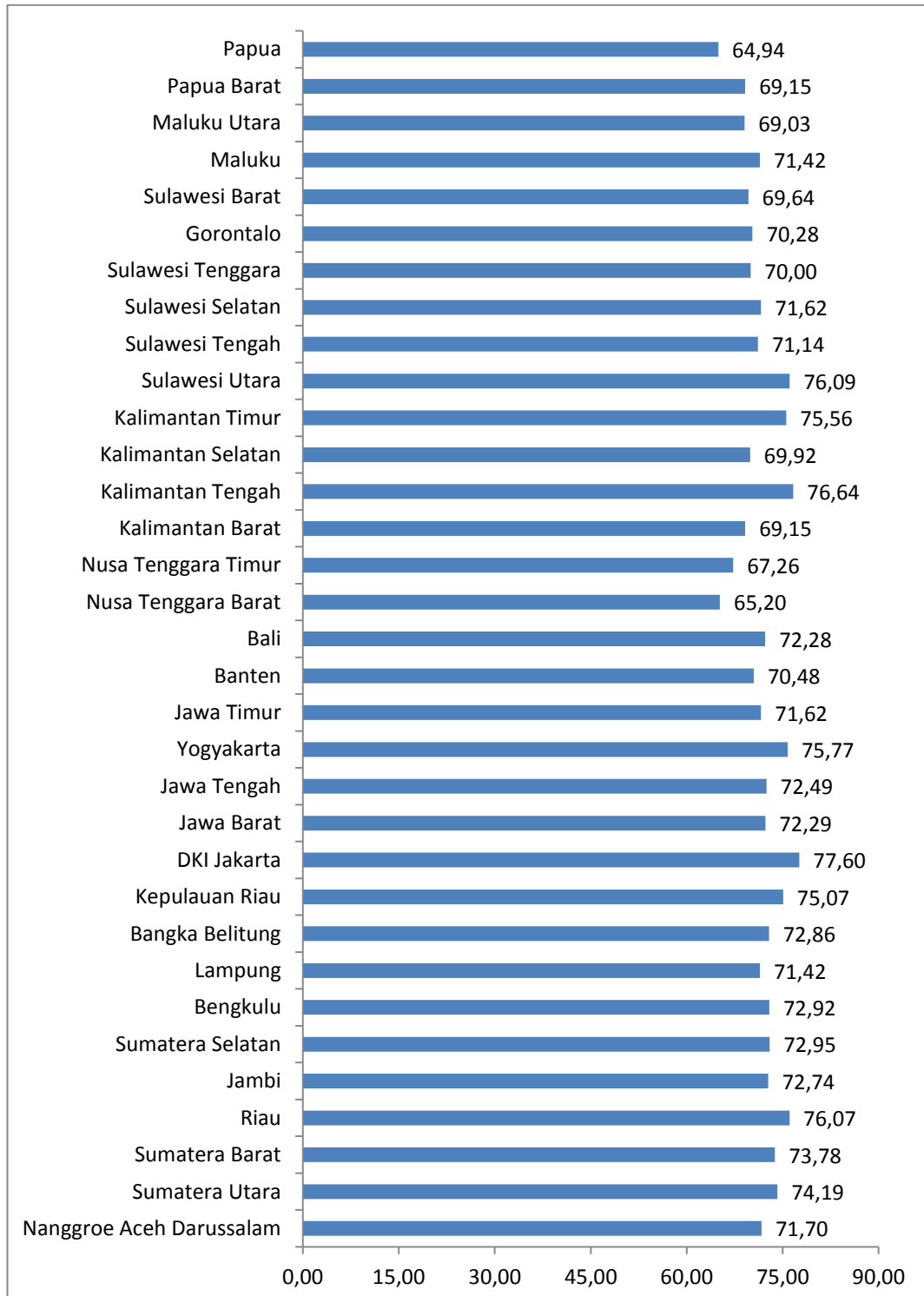


Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2004-2010, diolah

Grafik 1.3 menggambarkan bahwa IPM Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2010 selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2004 IPM Indonesia sebesar 68,7 yang meningkat menjadi 69,6 di tahun 2005, sebesar 70,1 di tahun 2006, sebesar 70,6 di tahun 2007, sebesar 71,17 di tahun 2008, sebesar 71,76 di tahun 2009, dan pada tahun 2010 mencapai 72,27.

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi di Indonesia

Tahun 2010



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010, diolah

Grafik 1.4 menggambarkan IPM Provinsi di Indonesia tahun 2010. Pada tahun 2010 Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (77,60 persen), Provinsi Kalimantan Tengah (76,64 persen), Provinsi Sulawesi Utara (76,09 persen), Provinsi Riau (76,07 persen), dan Provinsi Yogyakarta (75,77 persen). Sementara Provinsi dengan IPM terendah yaitu Provinsi Papua (64,94 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (65,20 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,26 persen), Provinsi Maluku Utara (69,03 persen), serta Provinsi Kalimantan Barat dan Papua barat (69,15 persen).

Try Haryono dalam tulisannya yang berjudul Kemiskinan yang Dieksploitasi menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Praktek korupsi yang terjadi dianggap sebagai penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Adanya korupsi menyebabkan anggaran yang sedianya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja menguap ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kondisi penduduk miskin makin terpuruk (*Korupsi yang Memiskinkan*, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan, sehingga korupsi dianggap telah menjadi budaya di Indonesia. Pada jaman kerajaan, banyak kerajaan yang hancur karena para bangsawannya hanya ingin memperkaya diri sendiri dan keluarganya tanpa mempedulikan kondisi rakyat, sehingga tidak ada sosok yang pantas untuk dijadikan penerus kerajaan. Pada

jaman penjajahan, Belanda dapat dengan mudah menguasai Indonesia karena perilaku korup para bangsawan. Gejala korupsi pada waktu itu didominasi oleh para penguasa (bangsawan, sultan, dan raja), sedangkan rakyat kecil belum memahaminya. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penguasa pribumi, tetapi orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda juga suka mengkorupsi harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Penyebab VOC hancur juga karena korupsi (Amin Rahayu, 2005).

Pasca kemerdekaan, budaya korupsi masih berlangsung. Di bawah kepemimpinan Soekarno, sudah dibentuk badan pemberantasan korupsi, yaitu Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan Operasi Budhi. Salah satu tugas Paran adalah mengharuskan pejabat pemerintahan untuk mengisi formulir (istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara). Akan tetapi, kewajiban pengisian formulir tersebut ditentang para pejabat. Usaha Paran akhirnya mengalami *deadlock* karena banyak pejabat publik berlindung di balik Presiden. Pada tahun 1963 upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan dengan menunjuk Nasution (Menkohankam) sebagai ketua dari lembaga Operasi Budhi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan korupsi. Operasi Budhi mengalami hambatan antara lain, direktur perusahaan atau lembaga negara yang akan diperiksa mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri (Agus Suradika, 2008).

Pada era orde baru, Soeharto menyalahkan pemerintahan orde lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Tak lama kemudian dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang

diketahui Jaksa Agung. Ketidaksiwaan kinerja TPK memancing protes dari mahasiswa dan pelajar, yang ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat. Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A Tjokroaminoto. Tugas utamanya adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom dan Pertamina. Namun komite ini hanya seperti macan ompong karena dugaan korupsi di Pertamina tidak mendapat respon pemerintah. Kemudian ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptim dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) yang salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi (Amin Rahayu, 2005).

Korupsi yang terjadi pada era reformasi tidak hanya dilakukan oleh elit pemerintahan, tetapi hampir seluruh elemen penyelenggara negara melakukan korupsi. Upaya pemerintahan pada masa BJ Habibie untuk memberantas korupsi adalah dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain itu juga dibentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Di masa pemerintahan Megawati hukum semakin merosot, para konglomerat bermasalah dengan mudah mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pada tahun 2003 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Taufiequrachman Ruki. Komisi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Amin Rahayu, 2005).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, semakin banyak kasus-kasus korupsi terungkap. Adanya kebebasan pers membuat puluhan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia muncul ke permukaan (Amin Rahayu, 2005). *Corruption Perception Index (CPI)* yang disusun *Transparency International* tahun 2010 masih sama dengan tahun 2009, yaitu 2,8. Indonesia berada pada posisi 110 dari 178 negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam menangani korupsi yang terjadi. Bahkan yang ada, korupsi semakin meluas, bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat tetapi sudah merambah ke pemerintah daerah.

Gambar 1.5 Persebaran Kasus Korupsi di Indonesia Periode 2001 – 2011



Sumber : Korupedia 2012

Setelah otonomi daerah, korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat tetapi menyebar sampai ke pemerintahan daerah. Dilakukannya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan rakyat memilih pemerintah yang dirasa pantas mewakili kepentingannya malah memperluas praktek korupsi ke daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah belum dapat bekerja efektif, karena terus munculnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya serta munculnya kabupaten dan provinsi baru. Korupsi semakin berkembang dengan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan yang buruk dan sumber pendapatan daerah pemekaran yang belum memadai. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) periode Januari – Juni 2010, terdapat 176 kasus korupsi baik di pemerintah pusat maupun daerah dengan 411 orang tersangka yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2.102 Triliun.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah yang sudah disidik. Kasus yang paling banyak dilakukan yaitu penyelewengan APBD yang pada tahun 2010 terdapat 11 kasus terungkap dan di tahun 2011 turun menjadi hanya 2 kasus yang terungkap, penyelewengan bantuan sosial/proyek pengentasan kemiskinan 10 kasus di tahun 2010 dan 1 kasus di tahun 2011, kasus penyuapan 7 kasus pada tahun 2010, dan kasus pengadaan/pembebasan lahan sebanyak 5 kasus di tahun 2010.

**Tabel 1.1 Kasus-kasus Korupsi di Daerah yang Sudah Disidik
Tahun 2010 - 2011**

No.	Jenis Korupsi	Tahun	
		2010	2011
1.	APBD	11	2
2.	Adipura	1	-
3.	Bantuan Sosial / Proyek Pengentasan Kemiskinan	10	1
4.	Pengadaan Buku	2	-
5.	Surat Izin Usaha	1	-
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	2	2
7.	Pengadaan / Pembebasan Lahan	5	-
8.	Proyek Energi Kelistrikan	2	-
9.	Proyek Teknologi Informatika	-	1
10.	Pembangunan Infrastruktur	2	-
11.	Penyuapan	7	-
12.	Perpajakan	1	-
13.	Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif	-	1
14.	Pengendalian Banjir	-	1
15.	Dana Subsidi Perumahan	-	1

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2012

Tabel 1.2 menunjukkan tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah pada kurun waktu 2004 – 2011. Selama kurun waktu delapan tahun, di tingkat pemerintah pusat telah terjadi 106 tindak pidana korupsi. Sedangkan di daerah, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan tindak pidana korupsi terbanyak yaitu 18 kasus, dan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi yang jumlah tindak pidana korupsinya rendah yaitu hanya 1 kasus yang terungkap pada tahun 2006.

**Tabel 1.2 Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah
Tahun 2004 - 2011**

No	Provinsi	Tahun								Jumlah
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	-	106
2.	NAD	1	1	-	-	1	-	-	-	3
3.	Sumatra Utara	-	-	-	2	-	-	2	1	5
4.	Sumatra Selatan	-	-	-	-	-	1	1	-	2
5.	Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	3	4	3	-	-	10
6.	DKI Jakarta	-	1	3	-	1	1	4	1	11
7.	Jawa Barat	-	2	-	1	5	3	7	-	18
8.	Jawa Tengah	-	-	2	2	-	1	-	-	5
9.	Jawa Timur	-	-	-	-	2	2	-	-	4
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-	3	-	3
11.	Kalimantan Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12.	Kalimantan Timur	-	-	6	3	2	-	-	-	11
13.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	1	-	1	-	2
14.	Sulawesi Selatan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15.	NTB	-	-	1	-	2	-	-	-	3

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2011

Berdasarkan data dari pemberitaan Kompas dan KPK dari tahun 2008 sampai tahun 2011, yang ditunjukkan Tabel 1.3, diperoleh bahwa pelaku korupsi di daerah paling banyak dilakukan oleh pejabat/mantan pejabat instansi pemerintah daerah, yaitu sebanyak 64 orang. Selanjutnya, anggota/mantan anggota DPRD menempati posisi kedua pelaku korupsi terbanyak, mencapai 37 orang. Jumlah gubernur dan bupati/walikota yang diperiksa atau masuk penjara sebanyak 29 orang. Begitu meluasnya korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan pejabat kecamatan/kelurahan dan pimpinan universitas pun terlibat kasus korupsi. Selain

itu, pelaku korupsi bukan hanya pejabat pemerintahan, tetapi juga pengusaha dan masyarakat.

**Tabel 1.3 Rekap Tren Korupsi di Daerah Berdasarkan Pelakunya
Tahun 2008 - 2011**

No.	Pelaku Korupsi	Jumlah Kasus
1.	Kepala/mantan kepala daerah	29
2.	Pimpinan/mantan pimpinan DPRD	16
3.	Anggota/mantan anggota DPRD	37
4.	Pejabat/mantan pejabat instansi pemda	64
5.	Pejabat BUMN/BUMD	4
6.	Pejabat KPUD	3
7.	Pimpinan pengadilan	1
8.	Pimpinan universitas	1
9.	Aktivis LSM	9
10.	Pejabat kecamatan/kelurahan	4
11.	Lainnya	5

Sumber : Litbang Kompas/stn, diolah dari pemberitaan Kompas dan KPK

Korupsi terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Dana yang pada awalnya disediakan untuk penanggulangan kemiskinan, tidak tepat sasaran karena dana tersebut masuk ke kantong pribadi para pejabat. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan yang ada semakin tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyebab masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Walaupun belum ada kajian literatur yang membuktikan hubungan langsung antara korupsi dan kemiskinan, tetapi kenyataannya korupsi menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan

di Indonesia. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah belum tentu dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi. Rendahnya IPM dan kapasitas fiskal akan mendorong terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah IPM, korupsi, dan kapasitas perekonomian merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan perilaku pada variabel-variabel penyebab kemiskinan antara tahun 2008 dan 2010?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2008 dan 2010.
2. Menganalisis perbedaan perilaku IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan pada tahun 2008 dan 2010.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan diketahuinya pengaruh

dari IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan korupsi di Indonesia. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori tentang teori kemiskinan, teori IPM dan hubungan antara kemiskinan dan IPM, teori korupsi dan hubungan antara kemiskinan dan korupsi, serta teori kapasitas fiskal dan hubungan antara kemiskinan dan kapasitas fiskal. Di samping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi batasan masalah, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu kondisi tingkat kemiskinan, korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal di 28 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010, serta penjelasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan ringkasan temuan, kesimpulan, dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian dan Batasan Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya mengacu pada keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Oleh karena itu, seseorang termasuk kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokoknya. Pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli atau lembaga adalah sebagai berikut :

- BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
- Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :
 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang,
 2. Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan,
 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa plester,

4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain,
 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
 6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan,
 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah,
 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu,
 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam sehari,
 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik,
 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m^2 – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005), - atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007),
 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD,
 14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- *World Bank* (2001) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

- Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.
- Michael P. Todaro (2004) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional.
- SMERU (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan. SMERU membagi kemiskinan dalam sembilan dimensi, yaitu :
 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan),
 2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi),
 3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga),

4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal,
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam,
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat,
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan,
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Berdasarkan beberapa pengertian kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketiadaan akses terhadap hal-hal vital dalam hidup disebabkan minimnya pendapatan yang bisa didapat oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengindikasikan kemiskinan digunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang melampaui ukuran garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah ukuran yang didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum baik konsumsi makanan, pakaian, maupun perumahan.

Garis kemiskinan berdasarkan konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu :

1. Pengeluaran untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya,

2. Jumlah kebutuhan lain yang bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Todaro (2004) menyatakan bahwa kemiskinan absolut dialami oleh penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum atau Garis Kemiskinan Internasional, yaitu USD 1 per hari dalam dollar paritas daya beli (PPP). Penetapan garis kemiskinan internasional oleh pemerintah suatu negara belum tentu digunakan dalam pembuatan program pengentasan kemiskinan di negaranya. Strategi yang digunakan dalam penentuan garis kemiskinan lokal adalah dengan menetapkan sekelompok makanan yang cukup berdasarkan persyaratan nutrisi dari penelitian medis tentang kalori, protein, dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, dengan menggunakan data survei rumah tangga lokal, diidentifikasi sekelompok makanan yang biasa dibeli oleh rumah tangga yang hampir tidak memenuhi persyaratan nutrisi. Selanjutnya untuk menentukan garis kemiskinan lokal ditambahkan pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya, seperti pakaian, tempat tinggal, dan sarana kesehatan. Garis kemiskinan lokal mungkin melebihi USD 1 per hari dalam paritas daya beli (PPP).

Batas kemiskinan menurut BPS didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan

perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Cara mengukur jumlah kemiskinan suatu daerah yang paling sederhana menurut BPS, yaitu dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi yang disebut dengan *Headcount Index*. Namun, indikator ini mengabaikan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan (*poverty gap*) digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. *Poverty gap* ini menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan, sehingga kemiskinan dapat hilang.

Sajogyo (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) menggunakan garis kemiskinan berdasarkan harga beras, yaitu tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan harga beras. Garis kemiskinan menurutnya yaitu nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk perkotaan. Akan tetapi pendekatan ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil.

Garis kemiskinan Sajogyo lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan BPS, sehingga jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan lebih rendah setiap tahunnya. Ukuran Sajogyo tidak menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang “mulus” seperti versi BPS, tetapi menunjukkan penurunan substansial baik kemiskinan yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Ukuran kemiskinan Sajogyo mempunyai dua kelemahan. Pertama,

Sajogyo hanya mengandalkan satu harga, yaitu harga beras. Kedua, beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, akan tetapi porsinya dalam anggaran keluarga turun bahkan di keluarga miskin porsinya turun dengan cepat.

Hendra Esmara (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) menetapkan garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan dilihat dari pengeluaran aktual barang dan jasa. Ukuran Esmara mampu menangkap dampak inflasi dan penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas barang-barang yang dikonsumsi, sehingga ukuran Esmara ini meningkat lebih cepat dibandingkan ukuran kemiskinan BPS dan Sajogyo. Akan tetapi, dalam ukuran Esmara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun perlahan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, meskipun laju penurunannya lebih rendah dibanding versi BPS dan Sajogyo.

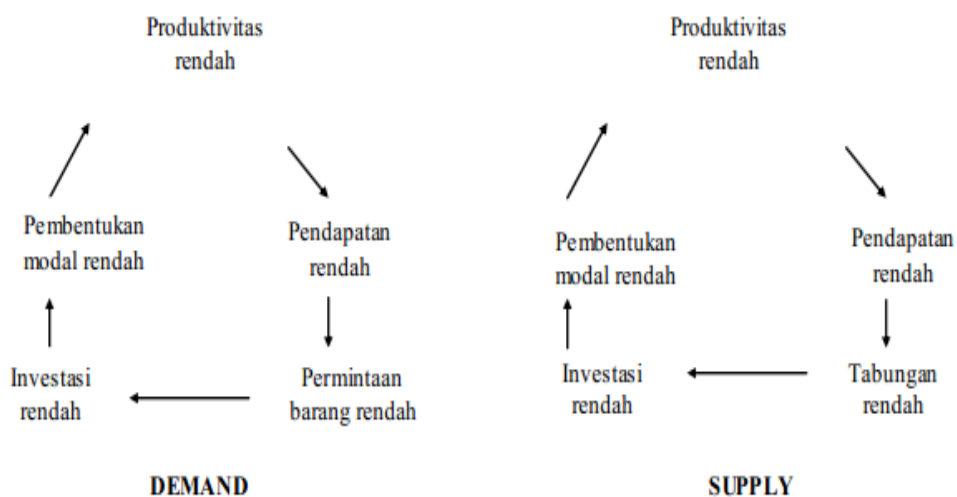
Dalam skripsi ini, penulis menggunakan definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Penulis juga menggunakan ukuran garis kemiskinan menurut BPS. Oleh karena itu, data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS.

2.1.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan

Sharp, dkk (dalam Prima Sukmaraga, 2011) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksmaan pola kepemilikan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan akibat perbedaan akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan

ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Ragnar Nurkse (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya.

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber : Mudrajat Kuncoro (2006)

Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal

dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya. Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal. Begitu seterusnya.

World Bank (1993) dalam *Policy Research Working Papers: Poverty and Policy* menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya demokrasi : hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka,
2. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk,
3. Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi,
4. Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik,
5. Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial,
6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin, dan

7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya pemupukan pendapatan dan kesejahteraan.

Joseph E. Stiglitz dan Gerald M. Meier dalam *Frontiers of Development Economics : The future in perspective* (2001) menyatakan bahwa pemerintah mempunyai program-program pengurangan kemiskinan yang dibiayai dengan pajak langsung yang progresif. Namun, muncul kesulitan untuk membuat masyarakat patuh terhadap pajak menyebabkan pajak ini tidak terkumpul dan program penurunan kemiskinan gagal.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak pro-kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang. Di beberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri mereka sendiri.

Fareed Zakaria dalam bukunya *The future of Freedom, Illiberal Democracy at Home and Abroad* menyatakan bahwa alih-alih memperbaiki kesejahteraan, demokrasi justru membuat perekonomian dan kehidupan sosial-politik kian terpuruk. Penyebab utamanya, tekanan politik dalam demokrasi bukan merupakan sesuatu yang tulus untuk kepentingan publik atau netral. Demokrasi merupakan representasi kepentingan kelompok atau instrumen elite politik untuk mendelegitimasi lawan politik yang sedang menjadi pemerintah. Dalam proses interaksi tersebut, kepentingan kaum miskin tersingkirkan walaupun sering dijadikan selubung isu sebenarnya. Beberapa teori meyakini bahwa demokrasi memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintah yang selanjutnya akan berfaedah mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, teori tersebut tidak menemukan implementasi memadai dalam praktik demokrasi di Indonesia pascareformasi tahun 1998 (T. Mustasya, 2007).

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa korupsi dapat memperburuk kemiskinan. Tingginya korupsi di suatu daerah menyebabkan para investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Rendahnya investasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan terhambat serta dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan daerah tersebut akan semakin buruk.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dari taraf hidup masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Kesejahteraan masyarakat ini merupakan hasil dari proses pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Sebagian dari usaha pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Indikator kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

$$IPM = \frac{1}{3}x(X_1 + X_2 + X_3) \quad (2.1)$$

Di mana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100 persen.

a) Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

b) Indeks Pendidikan

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolah.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Angka melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan pengertian rata-rata lama sekolah secara sederhana diilustrasikan sebagai berikut : misalkan di Kota Semarang ada 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata-rata lama sekolah di Kota Semarang adalah $\{5(6) + 5(9) + 5(12) + 5(0)\} : 20 = 6,25$ tahun.

Setelah diperoleh nilai Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai ini berada pada skala yang sama yaitu 0 dan 1. Selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS, sesuai ketentuan UNDP. Oleh karena itu untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus :

$$IP = \frac{2}{3} \text{Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{Indeks MYS} \quad (2.2)$$

c) Standar Hidup Layak

UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted* untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Untuk perhitungan IPM nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Pengukuran daya beli penduduk antar provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah

dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP) :

- a) Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SESENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
- b) Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c) Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks “Kemahalan” wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari SUSENAS modeul sesuai ketentuan UNDP.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$PPP/unit = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{\sum_{j=1}^{27} P(i,j)Q(i,j)} \quad (2.3)$$

Di mana :

$E(i,j)$ = Pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten/Kota i

$P(i,j)$ = Harga komoditi j di Kabupaten/Kota i

$Q(i,j)$ = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten/Kota i

2.1.2.2 Hubungan Kemiskinan dengan IPM

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Lanjouw, dkk (dalam Whisnu Adhi Saputra 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan

murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM

tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin. Menurut *World Development Report*, kemajuan pada kedua bidang saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain tidak cukup (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

2.1.3 Kapasitas Fiskal Dan Hubungan Kemiskinan Dengan Kapasitas Fiskal

2.1.3.1 Kapasitas Fiskal

Pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengalokasikan sejumlah besar anggaran pembangunan untuk membiayai program-program yang terkait dengan pengurangan kemiskinan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang tersebut otonomi diberikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik.

Desentralisasi fiskal diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila diatur langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kecenderungan tersebut masih belum nampak. Hal ini disebabkan sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan Kabupaten di Indonesia merespons desentralisasi fiskal dengan menggenjot PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi dengan peningkatan efektivitas pengeluaran APBD serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan salah satu peraturan operasional dalam implementasi Otonomi Daerah. PP ini telah mendorong daerah-daerah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan manajemen keuangan daerah yang sehat diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di bidang keuangan akan lebih terukur. Upaya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak karena merupakan salah satu tuntutan reformasi yang menekankan

pada upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang No.32 Tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan lainnya yang bersifat meliputi urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah membuat perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung urusan-urusan pemerintah di atas. APBD merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan

pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang serta realisasinya di masa lalu.

Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini kapasitas fiskal diukur dengan :

$$Kapasitas\ Fiskal = \frac{\sum PAD}{\sum Belanja} \times 100\% \quad (2.4)$$

2.1.3.2 Hubungan Kemiskinan dengan Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal dan pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidaknya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut. Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas pemerintah menyebabkan anggaran yang tersedia akan tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak dapat menyediakan layanan

publik yang berkualitas. Buruknya layanan publik ini membuat kondisi kemiskinan akan semakin buruk.

Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton menunjukkan hubungan sebab akibat positif yang kuat dari peningkatan kapasitas fiskal pemerintah untuk hasil pembangunan yang lebih baik, yang diukur dari pendapatan perkapita. Kaufmann dan Kraay menjelaskan bahwa di Amerika Latin dan Karibia, pemerintahan yang lebih baik cenderung menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Akan tetapi pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kapasitas pemerintahan berkurang (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain. Buruknya pelayanan pemerintah mempengaruhi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah sangat tergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar – seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).

2.1.4 Korupsi dan Hubungan Kemiskinan dengan Korupsi

2.1.4.1 Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lembaga *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sementara *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Definisi ini menunjukkan korupsi yang terjadi pada tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (Tika Widiastuti, 2008).

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector dalam studi kasusnya yang berjudul *Corruption and Poverty : A Review of Recent Literature* (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dibedakan menjadi penggelapan, nepotisme, penyuapan, pemerasan, *influence peddling*, dan penipuan.

UU No 33 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta gratifikasi.

Christopher Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti 2008) menyatakan bahwa korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu,
2. Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan,
3. Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah,
4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah,
5. Penggunaan dana secara tidak efisien,
6. Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme,
7. Penyalahgunaan kepercayaan,
8. Perusakan integritas moral dan etos umum, dan
9. Pelanggaran hukum dengan disintegritas hukum.

Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Motif melakukan korupsi secara politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti , 2008), yaitu :

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*) yang disebut juga sebagai korupsi kecil, yaitu korupsi yang berakar dalam kemiskinan. Contohnya apabila pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapat gaji yang dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*) yang disebut korupsi besar, yaitu berakar dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka memperolehnya akan tidak tepat waktu atau membutuhkan biaya administratif yang lebih besar.

Syed Hussein Alatas dalam (dalam Tika Widiastuti, 2008) membedakan tujuh tipologi korupsi, yaitu :

1. *Transactive corruption*, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak.
2. *Extortive corruption* (korupsi yang memeras), yaitu pihak pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.
3. *Insentive corruption*, korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Supportive corruption*, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
5. *Nepotistic corruption*, yaitu korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan dengan mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
6. *Defensive corruption*, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeraslah yang disebut korupsi.
7. *Autogenic corruption*, adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

Pengukuran korupsi dilakukan menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI). CPI adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh *Transparency International* (TI) sejak tahun 1996. CPI tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri. CPI merupakan indeks gabungan (*composite index*) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, Political Economic Risk Consultacy, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan

CPI. CPI memiliki rentang 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korups, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih.

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan mencoba mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik korupsi di suatu daerah. IPK diharapkan dapat dijadikan petunjuk awal permasalahan korupsi di suatu daerah dan dapat digunakan untuk mendesain strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. IPK Indonesia melihat sejauh mana kualitas tata kelola institusi publik dengan menanyakan langsung kepada para pelaku usaha berdasarkan pengalaman atau persepsi mereka. Survei ini berusaha memperoleh gambaran mengenai praktik korupsi yang terjadi di institusi publik ketika berhubungan dengan pelaku usaha.

IPK Indonesia berbeda dengan instrumen CPI, meskipun keduanya sama-sama mengukur persepsi korupsi menggunakan metode kuantitatif dengan survei. *Pertama*, CPI mengukur persepsi korupsi di 180 negara di dunia dengan menggunakan data komposit (indeks gabungan). Sedangkan IPK mengukur persepsi korupsi di kabupaten/kota di Indonesia dengan melakukan wawancara langsung kepada responden. *Kedua*, CPI diluncurkan setiap tahun sekali. Sedangkan IPK Indonesia dua tahun sekali.

TII meluncurkan IPK Indonesia dua tahun sekali sejak tahun 2004. Hingga saat ini, TII telah melakukan 4 kali survei IPK (2004, 2006, 2008, dan 2010). Setiap survei yang dilakukan, TII berusaha melakukan perbaikan metode, menambah jumlah kota dan jumlah responden. Tahun 2004 TII mensurvei 21 kota dengan 1.305 responden, tahun 2006 mensurvei 32 kota dengan 1.760 responden,

tahun 2008 mensurvei 3.842 responden dari 50 kota, dan tahun 2010 survei tetap dilakukan di 50 kota dengan penambahan jumlah responden menjadi 10.000 responden. Sama seperti CPI, IPK Indonesia mempunyai rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup dan 10 sangat bersih.

Dampak-dampak korupsi menurut Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti, 2008), yaitu :

1. Pengembangan kesejahteraan atau pembangunan yang salah arah di sektor-sektor vital masyarakat (misal telekomunikasi, kesehatan, energi, sistem lalu lintas/transportasi, dan pertahanan). Investasi tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak di bidang ekonomi, sosial dan politik, melainkan berdasarkan pembayaran suap yang paling tinggi diharapkan.
2. Beban hutang yang semakin tinggi, jika diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan tidak berdampak pada pengembangan kesejahteraan atau keuntungan ekonomi yang dibutuhkan, sehingga mempersulit pembayaran bunga hutang atau pelunasan hutang.
3. Kekurangan pajak dan pendapatan-pendapatan publik lain untuk tugas-tugas umum, karena pejabat-pejabat pajak yang korup, sehingga rasa tanggungjawab untuk membayar pajak rendah.
4. Penggelapan pembayaran pajak karena uang korupsi tidak terkena pajak.
5. Resiko-resiko keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang semakin tinggi.
6. Pengaruh terhadap persaingan di pasar yang tidak adil.
7. Ketidakefisienan ekonomi.

8. Menghambat investor-investor yang potensial dalam mengembangkan kesejahteraan.
9. Jarak kesejahteraan (antar golongan yang kaya dan yang miskin) semakin besar.
10. Terjadi intransparansi keuangan publik sehingga timbul kemungkinan untuk dapat diintervensi oleh mafia.
11. Kehilangan kepercayaan oleh negara dari masyarakat.
12. Integritas moral individu-individu dan lembaga-lembaga diperlemah dan semakin tidak dipercaya.
13. Keruntuhan demokrasi, karena keputusan-keputusan transparan adalah prasyarat untuk demokrasi.
14. Sistem hukum diperlemah, termasuk kontrol dari negara hukum dan pemerintah yang tidak dapat berfungsi lagi.
15. Mendukung sistem-sistem ditaktor.
16. Kerja sama dalam bidang pengembangan kesejahteraan (baik publik maupun swasta) semakin tidak diterima, dipercaya dan didukung.

Syed Hussein Alatas (dalam Tika Widiastuti, 2008) mengidentifikasi korupsi dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbulkan ketidakefisienan dalam keseluruhan birokrasi.
 2. Segi ekonomi, korupsi menyebabkan beban yang dirasakan oleh masyarakat.
- Implikasi tingginya korupsi dapat menyebabkan harga-harga lebih mahal serta adanya pajak dan pungutan lain yang tidak sah. Manipulasi pajak oleh koruptor harus ditutup dengan pajak dari warga negara yang jujur. Korupsi

juga menimbulkan biaya-biaya baru dan mengabaikan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

3. Larinya tenaga ahli ke luar negeri dan lahirnya berbagai bentuk ketidakadilan, pemerintah yang mengabaikan tuntutan kelayakan pemerintahan, sikap masa bodoh yang semakin luas, kelumpuhan psikologis yaitu tidak adanya kreativitas kerja yang terbit dari situasi yang sehat, munculnya kejahatan lain dalam masyarakat, melemahnya semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, dan lain-lain.

J.S. Nye (dalam Erika Revida, 2003) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap,
2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya, dan
3. Pengurangan kemampuan aparaturnya pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Mc Mullan (dalam Erika Revida, 2003) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, pemborosan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha (terutama perusahaan asing), ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Sarah Lery Mboeik (dalam Paul SinlaEloE, 2007) berpendapat bahwa tindakan korupsi telah berakibat pada disharmoni dan disintegrasi bangsa, baik

berdasarkan kelompok/golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial-ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.

Gadrida Rosdiana Djukana (dalam Paul SinlaEloE, 2007) menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, bombastisnya tingkat kematian ibu hamil, parahnya angka kekerasan terhadap perempuan, melonjaknya angka putus sekolah, meningkatnya pengidap gizi buruk dan merebaknya persoalan kriminalitas.

Dampak dari tindak korupsi digambarkan oleh Gatot Sulistoni, Eryvn kaffah, dan Syahrul Mustofa (dalam Paul SinlaEloE, 2007) dalam tiga kategori, yaitu :

1. Aspek politik. Tindakan korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara, karena :
 - a) Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor,
 - b) Posisi pejabat dalam struktur pemerintah diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak potensial, dan tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni uji kelayakan (*Fit and Proper Test*), tetapi lebih dipengaruhi oleh politik uang dan kedekatan hubungan, dan
 - c) Proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan berkelanjutan terhambat.

2. Aspek sosial. Pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi dihiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Selain itu, korupsi juga mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.
3. Aspek ekonomi. Dampak tindak korupsi terhadap aspek ekonomi contohnya adalah :
 - a) Pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat,
 - b) Harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus membayar “upeti” atau “biaya siluman” sejak masa perijinan sampai produksi. Khusus untuk biaya siluman, biasanya dapat mencapai 20 persen hingga 30 persen dari total biaya operasional perusahaan. Tingginya biaya siluman ini otomatis akan menurunkan tingkat keuntungan usaha dari para pemilik modal/pengusaha, oleh karena itu mereka menekan upah buruh untuk meningkatkan keuntungan,
 - c) Sebagian besar uang hanya berputas pada segelintir elite ekonomi dan politik. Realitas seperti ini menyebabkan sektor usaha yang berkembang hanya di sektor elite, sementara sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang, dan

- d) Produk petani tidak mampu bersaing. Tingginya biaya siluman juga mengakibatkan harga-harga faktor produksi pertanian (pupuk, pestisida, alat mekanik, dan lain-lain) sangat mahal. Akibatnya harga-harga produk petani juga meningkat, sehingga tidak mampu meraih keuntungan karena kalah bersaing dengan produk impor.

2.1.4.2 Hubungan Kemiskinan dengan Korupsi

Korupsi menyebabkan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah sehingga menjadi salah satu penghambat terbesar dalam pembangunan ekonomi dan manusia. Huguette Labelle, ketua *Transparency International*, menyatakan bahwa korupsi membuat jutaan penduduk terperangkap kemiskinan. Hubungan antara korupsi dan kemiskinan memang tidak bisa dikuantifikasi dan langsung. Akan tetapi hubungan sebab akibat antara korupsi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan.

Hasil penelitian Paolo Mauro (1995) menunjukkan bahwa hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Paolo Mauro (1997) menyatakan bahwa konsekuensi korupsi yaitu *pertama*, dapat melemahkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi berkurang. *Kedua*, terjadi *talent miss allocated* yaitu korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. *Ketiga*, pinjaman dan hibah luar negeri pengalokasiannya tidak tepat. *Keempat*, penerimaan pemerintah dari pajak berkurang yang mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah sehingga kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa publik tidak memadai.

Studi kasus yang dilakukan oleh Tika Widiastuti (2008) tentang dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat yang terjadi di negara-negara muslim anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) menghasilkan kesimpulan bahwa korupsi berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Terjadinya inefisiensi pada sisi pengeluaran pemerintah karena adanya korupsi menyebabkan kurangnya pengaruh positif terhadap kesejahteraan.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan dampak korupsi terhadap kemiskinan melalui dua model, model ekonomi dan model pemerintahan. Model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan semakin buruk. Sementara itu, model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik utama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi), menurunkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, dan meningkatkan tekanan anggaran pada pemerintah. Buruknya kapasitas pemerintahan ini menyebabkan kemiskinan semakin meningkat.

Korupsi tidak selalu menyebabkan kemiskinan, karena korupsi bisa “tidur bersama” dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Leff dan Huntington menyatakan bahwa tidak semua korupsi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat “*speed money*” mempunyai dampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya suap membuat pengusaha terhindar dari penundaan birokrasi, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai rencana. Sementara Robert Klitgaard menjelaskan adanya “dana taktis” pimpinan birokrat terkadang dibutuhkan demi mempercepat dan melancarkan proses kegiatan (dalam Tika Widiastuti, 2008). Pote Sarasin, Ketua Dewan Pembangunan Thailand tahun 1980-an, menyatakan apabila korupsi dibatasi di bawah 20% maka pembangunan masih mungkin berjalan (*Korupsi yang Memiskinkan*, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).

Korupsi menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan akan meningkat, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Korupsi akan mengurangi efisiensi usaha peningkatan kesejahteraan, menciptakan ketidakadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, berkurangnya penerimaan pajak dan melemahkan jiwa kewirausahaan, berkurangnya pengeluaran pemerintah sehingga terjadi ketidaktepatan alokasi, melemahkan pertumbuhan ekonomi, menghambat penyediaan barang publik, dan mengganggu sistem jaminan sosial. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan meningkat (Chetwynd, dkk, 2003). Korupsi berpengaruh tidak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan melalui transmisi pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh langsung jika korupsi terjadi pada program-program anti kemiskinan.

Vizto Tanzi (1998) menunjukkan alasan mengapa korupsi dapat menghambat pertumbuhan. *Pertama*, korupsi mengurangi kemampuan pemerintah dalam pengawasan untuk memperbaiki kegagalan pasar bahkan mungkin akan

memperburuk kegagalan pasar. *Kedua*, korupsi mendistorsi insentif. Individu-individu dalam masyarakat yang korup melakukan aktivitas *rent-seeking* dan bukan melakukan aktivitas yang produktif. Bahkan dalam kasus tertentu Murphy, Shleifer dan Vishny (dalam Vizto Tanzi, 1998) korupsi dapat mengarahkan masyarakat pada aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah negatif. *Ketiga*, korupsi berperan sebagai pajak arbiter. Korupsi menyebabkan beban materi yang sangat besar karena biaya mencari birokrat-birokrat penerima suap juga harus dimasukkan dengan biaya negosiasi dan pembayaran suap. Apalagi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat berdasarkan suap sangat rentan untuk dilanggar jika melibatkan birokrat yang cukup banyak. *Keempat*, korupsi mengurangi bahkan merusak fundamental pemerintah dalam menegakkan perlindungan hak milik. Ketika seseorang dihalangi untuk menuntut hak kepemilikannya, atau seseorang yang lain dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kontrak karena korupsi, maka peran fundamental pemerintah terdistorsi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tergantung.

Din Syamsudin (2007) dalam artikel berjudul Jihad Melawan Korupsi menyatakan bahwa korupsi telah menyebabkan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan yang semakin terbuka, dan angka pengangguran melambung tinggi serta masih banyak implikasi sosial lainnya. Faisal Akbar, seorang pakar hukum, mengatakan bahwa maraknya korupsi disebabkan lemahnya integritas moral dari setiap pelaku birokrasi dan pengusaha memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang menyimpang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan, korupsi, kesejahteraan, dan kapasitas fiskal di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) berjudul “*Corruption and poverty : A Review of Recent Literature*” bertujuan meneliti hubungan antara korupsi dengan kemiskinan. Penelitian ini melihat dampak korupsi terhadap kemiskinan melalui dua model, yaitu model ekonomi dan model pemerintahan. Pada model ekonomi dijelaskan bahwa korupsi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat yang kemudian menyebabkan kemiskinan semakin meningkat. Model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi dapat mengurangi kapasitas pemerintah sehingga kemiskinan meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korupsi tidak memperburuk dan menyebabkan kemiskinan, tetapi memiliki hubungan kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pemerintahan.
- b) Studi kasus yang dilakukan oleh Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) berjudul “*Evolution of Thinking about Poverty*” menjelaskan tentang perubahan definisi kemiskinan dan ukurannya serta kebijakan dan strategi apa yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah meskipun definisi kemiskinan diperluas tetapi tidak ada perubahan signifikan dalam proporsi kemiskinan di negara atau masyarakat. Definisi

yang lebih luas meningkatkan pemahaman tentang kemiskinan, serta rancangan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti (2008) dengan judul “Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara Muslim” meneliti tentang dampak korupsi melalui instrumen kebijakan fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan di negara yang korupsinya tinggi dengan negara yang tingkat korupsinya rendah di negara-negara muslim anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada tahun 2003 – 2006. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi *maximum likelihood* dan pengujiannya dengan teknik pengolahan data *structural equation modeling* (SEM).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya inefisiensi pada sisi pengeluaran pemerintah kurang memberikan pengaruh positif langsung pada kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kemungkinan alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat atau terjadi korupsi pada alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Di negara muslim yang tingkat korupsinya tinggi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara muslim yang tingkat korupsinya rendah.

- d) Penelitian yang dilakukan oleh Sajeev Gupta, Hamid Davoodi, dan Rosa Alonso-Terme (1998) dengan judul “*Does Corruption Affect Income*

Inequality and Poverty?” bertujuan untuk mengetahui bagaimana korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korupsi mengganggu fungsi dari pemerintah sebagai pengalokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi, dan redistribusi pendapatan dimana fungsi-fungsi ini mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi berimplikasi signifikan negatif bagi pertumbuhan dan pemerataan, sehingga kebijakan yang mengurangi korupsi akan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

- e) Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo (2010) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan serta menganalisis perbedaan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2003-2007. Penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan fungsi persamaan sebagai berikut :

$$K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 P_{it} + u_{it} \quad (2.5)$$

Di mana :

- K = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah
 Y = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah
 U = upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah

- PD = pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah
- P = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah
- α_0 = intersep
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi variabel bebas
- u_{it} = komponen error di waktu t untuk unit cross section i
- i = 1, 2, 3, ..., 35 (data cross section kabupaten/kota di Jawa Tengah)
- t = 1, 2, 3, 4 (data time series tahun 2003-2007)

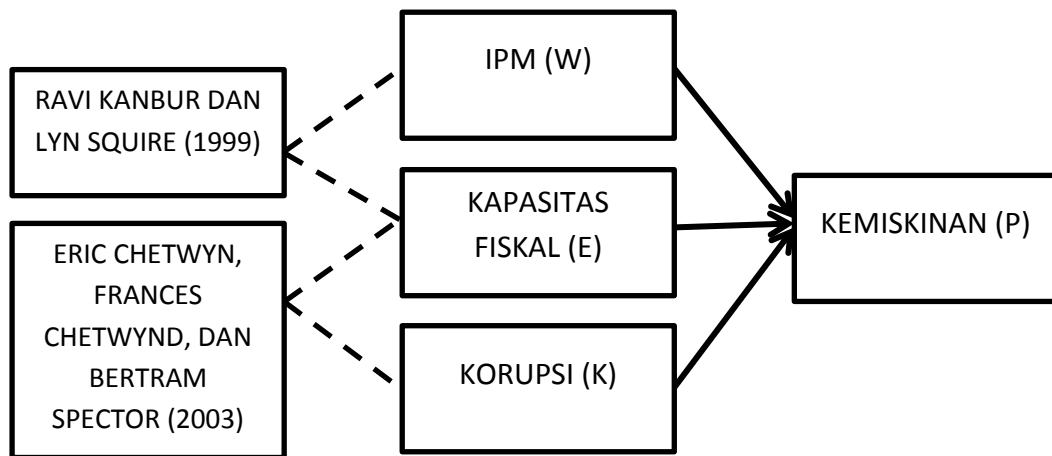
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan apakah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia? Faktor-faktor yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan menurut penulis adalah IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal.

Penulis berusaha menguji secara empiris dengan menggabungkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eric Chetwyn, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) serta Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999). Penelitian Eric Chetwyn dkk mendasari pemilihan variabel korupsi dan kapasitas fiskal sebagai variabel penyebab kemiskinan. Sementara penelitian Ravi Kanbur dan Lyn Squire mendasari pemilihan variabel IPM dan juga kapasitas fiskal.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:

--- : sumber pemilihan variabel

→ : faktor penyebab

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel IPM masyarakat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010. Semakin tinggi IPM suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tersebut akan menurun.
2. Diduga variabel kapasitas fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan kabupaten/kota tersebut akan menurun.

3. Diduga variabel korupsi mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010. Semakin korup suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tersebut juga akan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisa pengaruh korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010. Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota yang ada di masing-masing Provinsi di Indonesia. Namun terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang data-datanya tidak lengkap ataupun tidak dipublikasikan secara nasional. Dengan keterbatasan tersebut, jumlah Kabupaten/Kota yang diteliti adalah 38 Kabupaten/Kota, yaitu Banda Aceh, Sibolga, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surakarta, Tegal, Yogyakarta, Jember, Kediri, Malang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kendari, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura, Ternate, Pangkal Pinang, Gorontalo, Batam, Tanjung Pinang, Sorong, dan Mamuju.

Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan perbedaan perilaku pengaruh korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010. Adanya keterbatasan data juga yang mendasari pemilihan tahun 2008 dan 2010 sebagai sampel penelitian.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat kemiskinan dari 38 kabupaten/kota tahun 2008 dan 2010. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal dari 38 kabupaten/kota tahun 2008 dan 2010.

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (P) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan suatu kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Kosumsi dan Kor dengan rumus penghitungannya yaitu :

$$P = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{z-y_i}{z} \quad (3.1)$$

Dimana :

z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

2. IPM (W) dinyatakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang mengukur usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak suatu kabupaten/kota yang diambil dari BPS. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah

dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*living standards*). IPM dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IPM = \frac{1}{3}x(X_1 + X_2 + X_3) \quad (3.2)$$

Dimana :

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

3. Kapasitas fiskal (E) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kapasitas fiskal dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$E_i = \frac{\sum PAD_i}{\sum Belanja_i} \times 100\% \quad (3.3)$$

dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Belanja = Jumlah Belanja

i = Kabupaten/kota

4. Korupsi (K) adalah skala korupsi atau tingkat korupsi kabupaten/kota yang diukur dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang dikeluarkan oleh

Transparency International Indonesia setiap dua tahun sekali. IPK Indonesia merupakan skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di 50 kabupaten/kota di Indonesia yang disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. IPK menunjukkan persepsi pengusaha terhadap birokrat. Hasil pengukuran ini disajikan dalam parameter kuantitatif yang berwujud angka untuk membandingkan antara skala korupsi suatu daerah dengan daerah yang lain, atau tingkat korupsi suatu daerah tahun 2008 dan 2010. Rentang indeks nya antara 0 (nol) sampai dengan 10, dimana 0 (nol) berarti sangat korup dan 10 berarti sangat bersih.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan masalah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan KPK (Komisi Penanggulangan Korupsi) serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti majalah, koran dan internet. Data sekunder yang digunakan adalah data kerat lintang (*cross-section data*) yang meliputi 38 kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun 2008 dan 2010.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, dimana kedua tujuan tersebut dianalisis dengan metode yang berbeda.

3.4.1 Matriks Korelasi

Untuk mengetahui kekuatan hubungan yang terdapat antara IPM, kapasitas fiskal, korupsi, dan kemiskinan digunakan matriks korelasi. Hasil perhitungan korelasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

- a. Korelasi positif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati 1. Ini berarti bahwa setiap kenaikan skor/nilai pada variabel yang satu akan diikuti dengan kenaikan skor/nilai variabel lainnya,
- b. Korelasi negatif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati atau sama dengan -1. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor/nilai pada variabel yang satu akan diikuti dengan penurunan skor/nilai variabel lainnya. Sebaliknya, apabila skor/nilai dari variabel yang satu turun, maka skor/nilai dari variabel yang lain akan naik.
- c. Tidak ada korelasi, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati atau sama dengan 0 (nol). Hal ini berarti bahwa naik turunnya skor/nilai satu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik/turunnya variabel yang lainnya.

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Sarwono (2006) memberikan kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel sebagai berikut:

- a. 0 : tidak ada korelasi antara dua variabel
- b. $|0 \leq R^2 \leq 0,25|$: korelasi sangat lemah

- c. $|0,25 \leq R^2 \leq 0,5|$: korelasi cukup kuat
- d. $|0,5 \leq R^2 \leq 0,75|$: korelasi kuat
- e. $|0,75 \leq R^2 \leq 0,99|$: korelasi sangat kuat
- f. 1 : korelasi sempurna

3.4.2 Tujuan Pertama

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan yang dianalisis dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan program Eviews 6. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bukan data populasi (keseluruhan objek penelitian) melainkan data sampel (bagian kecil dari populasi). Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya dapat dibentuk fungsi regresi sampel atau *Sample Regression Function (SRF)* yang dijadikan sebagai penaksir fungsi regresi populasi atau *Population Regression Function (PRF)*.

Penelitian mengenai hubungan kemiskinan dengan korupsi, IPM dan kapasitas fiskal di 38 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010 ini dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$P_i = \alpha_0 + \alpha_1 W_i + \alpha_2 E_i + \alpha_3 K_i + u_i \quad (3.4)$$

dimana :

P = tingkat kemiskinan

K = korupsi

W = IPM

E	= kapasitas fiskal
u_1	= komponen eror
α_0	= intersep
$\alpha_{1,2,3}$	= koefisien regresi variabel independen
i	= kabupaten/kota
t	= tahun 2008 dan 2010

3.4.2.1 Pengujian Statistik

a) Determinasi (Uji R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodnes of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Gujarati, 2010).

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati, 2010).

b) Uji Signifkansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Gujarati, 2010).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi secara bersama-sama terhadap Kemiskinan.

H_1 : $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi bersama-sama terhadap Kemiskinan.

Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel dengan $\alpha = 5$ persen dan $\alpha = 10$ persen. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, bila F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2010). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

a) H_0 : $\alpha_1 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan IPM secara individu terhadap Kemiskinan.

b) $H_1 : \alpha_1 < 0$, yaitu apabila IPM suatu daerah tinggi maka Kemiskinan daerah tersebut rendah.

c) $H_0 : \alpha_2 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan Kapasitas fiskal secara individu terhadap Kemiskinan.

$H_1 : \alpha_2 < 0$, yaitu apabila Kapasitas fiskal suatu daerah tinggi maka Kemiskinan di daerah tersebut rendah.

d) $H_0 : \alpha_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan Korupsi secara individu terhadap Kemiskinan.

$H_1 : \alpha_3 < 0$, yaitu apabila semakin korup suatu daerah maka kemiskinan daerah tersebut akan tinggi.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan $\alpha = 5$ persen dan $\alpha = 10$ persen. Apabila t hitung $>$ t tabel, maka hipotesis alternatif tidak cukup bukti yang kuat untuk menolak sehingga variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.4.2.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data, data diuji sesuai asumsi klasik. Apabila terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik, dan sebaliknya apabila asumsi klasik terpenuhi digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik. Model regresi tersebut

harus bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal (Gujarati, 2010).

3.4.3 Tujuan Kedua

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perilaku pengaruh IPM, korupsi, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan antara tahun 2008 dan 2010 yang dapat diketahui dengan menganalisis koefisien hasil regresi. Uji kausalitas granger dilakukan untuk menganalisa lebih dalam hubungan kausalitas antara masing-masing variabel.